



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUWAJANTO
2. Jabatan : KEPALA KPPN SEMARANG I
3. NHK : 119101

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.195.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 423 m2/150 m2 di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 745.000.000
2. Tanah Seluas 92 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. Tanah Seluas 93 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
4. Tanah Seluas 80 m2 di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
5. Tanah Seluas 80 m2 di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **90.500.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOTOR, HONDA -- Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
4. MOTOR, HONDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **13.300.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **16.961.899**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **120.000.000**

Sub Total **Rp.** **1.435.761.899**



III. HUTANG

Rp. 140.842.273

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.294.919.626

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.